

Suksesi Kekuasaan Di Pemerintahan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Iskandar

Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Email: iskandar@ump.ac.id

Received: 20 Januari 2025 Revised: 28 Januari 2025 Accepted: 15 Februari 2025 Published: 28 Februari 2025

Abstract

This research aims to find out how the process of succession or change of head of government during the Liberal Democracy in Indonesia. Liberal Democracy in Indonesia has actually been going on since Indonesia's Independence, but the existing laws have not regulated the parliamentary system in it. In general, Liberal Democracy in Indonesia has been known since the Temporary Constitution of 1950 took effect. The main discussion of this article on the change of head of government or prime minister was chosen because during the Liberal Democracy there were 7 cabinet changes within 9 years. In the 7 cabinet changes, there were 6 people who had served as prime minister. The process of changing prime ministers is interesting to discuss because in a short time the appointed prime ministers had to manage a young country like Indonesia. The prime ministers who were elected at that time included Moh. Natsir, Sukiman Woryosanjoyo, Mr Wilopo, Ali Sastroamijoyo, Burhanudin Harahap, and Djuanda Kartawijaya. Broadly speaking, the discussion in this research will discuss (1) the process of Liberal Democracy in Indonesia, (2) the process of succession or change of power in the Indonesian government during Liberal Democracy, and (3) the birth of the Presidential Decree of 5 July as the end of Liberal Democracy in Indonesia.

Keywords: Liberal, Democracy, Parleментарy, Succession, Uuds50

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses suksesi pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia. Demokrasi Liberal di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak Indonesia Merdeka, namun undang-undang yang ada belum mengatur sistem parlementer didalamnya. Secara umum Demokrasi Liberal di Indonesia dikenal sejak Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 berlaku. Pada saat Demokrasi Liberal berlangsung, terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun. Pada 7 kali pergantian kabinet terdapat 6 orang yang pernah menjabat sebagai perdana menteri. Proses pergantian perdana menteri inilah yang menarik untuk di bahas karena dalam waktu yang singkat para perdana menteri yang ditunjuk harus mengelola negara yang masih muda seperti Indonesia. Perdana menteri yang terpilih pada saat itu diantaranya adalah Moh. Natsir, Sukiman Woryosanjoyo, Mr. Wilopo, Ali Sastroamijoyo, Burhanudin Harahap, dan Djuanda Kartawijaya. Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini akan membahas tentang (1) Proses berlangsungnya Demokrasi Liberal di Indonesia, (2) Proses berjalannya suksesi atau pergantian kekuasaan di pemerintahan Indonesia saat Demokrasi Liberal, dan (3) Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli sebagai akhir dari Demokrasi Liberal di Indonesia.

Kata Kunci: Suksesi, Liberal, Uuds50, Parleментарy, Demokrasi

Copyright © 2025, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Demokrasi. Hal tersebut merupakan amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang berbunyi “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...”. Kalimat “yang berkedaulatan rakyat” tersebut

merepresentasikan makna dari Demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Cora Elly Noviati, 2013). Hal tersebut memang tidak dapat di pungkiri karena Indonesia lahir dari perjuangan rakyat yang ingin lepas dari penjajahan, sehingga pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan amanat rakyat yaitu demokrasi.

Indonesia dalam menjalankan demokrasi mengalami beberapa kali penyesuaian hingga memunculkan beberapa istilah demokrasi, diantaranya Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin hingga Demokrasi Pancasila. Istilah tersebut muncul sebagai wujud pelaksanaan konstitusi dan juga kebijakan pemangku kekuasaan. Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang lahir dari kebijakan penguasa. Demokrasi Terpimpin lahir oleh kebijakan Presiden Soekarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sementara Demokrasi Pancasila lahir oleh Presiden Soeharto untuk mempertegas ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kedua demokrasi tersebut berbeda dengan Demokrasi Liberal, yaitu demokrasi yang lahir setelah Undang-undang Sementara 1950 (UUDS 50) disepakati sebagai konstitusi negara menggantikan UUD 45.

Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung pada tahun 1950-1959. Demokrasi ini menganut sistem parlementer yaitu kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Menariknya pada saat itu Indonesia menganut sistem multipartai sehingga terjadi banyak konflik kepentingan ketika suatu pemerintahan sedang berlangsung. Konflik kepentingan ini juga yang menjadikan suksesi kekuasaan di pemerintahan berlangsung menarik dalam kurun waktu 9 tahun. Selama diberlakukannya UUDS 50 terjadi tujuh kali pergantian kabinet (Moh Mahfud MD, 2000). Pergantian kabinet tersebut tentu saja juga diikuti dengan pergantian kepala pemerintahan yang saat itu dipegang oleh perdana menteri. Pergantian kepala pemerintahan sebanyak tujuh kali dalam 9 tahun ini cukup menarik untuk dibahas, oleh karena itu penelitian ini akan membahas materi tentang Suksesi Kekuasaan di Indonesia Pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah cara seorang sejarawan mendekati objek penelitiannya dengan langkah-langkah yang terstruktur sehingga mempermudah dalam memperoleh data sejarah (Priyadi, 2013). Penelitian menggunakan metode sejarah memiliki beberapa langkah, yaitu pemilihan topik, *heuristik* atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, intepretasi, dan yang terakhir adalah historiografi (Kuntowijoyo, 2013).

Pemilihan topik dalam penelitian ini adalah tentang suksesi kekuasaan, sehingga terpilihlah judul Sejarah Suksesi Kekuasaan di Pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Heuristik pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan telaah dokumen berupa buku, artikel dan jurnal. Verifikasi pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan sumber yang relevan dengan topik, materi dan masa sehingga sesuai dengan data yang dibutuhkan dan memperkuat objektifitas penelitian. Intepretasi pada tahap ini peneliti menelaah hasil data yang sudah diverifikasi sehingga dapat mempermudah dalam menuangkan data kedalam tulisan. Historiografi pada tahapan ini peneliti melakukan penulisan hasil penelitian sehingga data yang diperoleh dapat di baca dan di pahami dengan mudah oleh Masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Liberal di Indonesia

Demokrasi liberal di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka tahun 1945, namun pelaksanaannya tidak didasarkan pada konstitusi sebab UUD 45 tidak menganut sistem parlementer (Moh Mahfud MD, 2000). Demokrasi liberal lebih dikenal sejak disahkannya UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia (RI) menjadi UUDS RI. Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden didepan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah UU tersebut di sahkan, pada 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno memproklamirkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ridwan, 2021). Secara resmi Indonesia menganut sistem parlementer atau liberal pada tanggal 17 Agustus 1950.

Pemerintahan pada masa demokrasi liberal digerakan oleh beberapa alat-alat perlengkapan negara. Pada pasal 44 UUDS 1950 alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan (Moh Mahfud MD, 2000). Alat-alat perlengkapan negara tersebut dalam UUDS memiliki fungsi masing-masing dalam pemerintahan.

Presiden menjadi simbol kepala negara dan tidak bertanggung jawab terhadap pemerintahan pada masa demokrasi liberal (G Moedjanto, 1988). Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Presiden menunjuk seseorang atau beberapa orang pembentuk kabinet, setelah itu presiden menunjuk dari salah seorang pembentuk kabinet tersebut menjadi perdana menteri yang akan melaksanakan jalannya pemerintahan (P.J Suwarno, 1993). Oleh karena itu meskipun presiden sebagai simbol kepala negara, presiden punya kuasa penuh untuk mengangkat maupun menurunkan perdana menteri. Posisi presiden dan wakil presiden tidak dapat di ganggu gugat sesuai yang termaktub dalam UUDS 50 pasal pasal 83 ayat 1 dan 2 (P.J Suwarno, 1993). Hal tersebut juga menjadi ciri utama dari demokrasi liberal pada masa ini meski kabinet dan perdana menteri silih berganti namun yang menjadi presiden tetap Soekarno dan wakilnya adalah Moh Hatta (Rusfiana & Nurdin, 2017).

Perdana Menteri dalam menjalankan pemerintahan bertanggung jawab terhadap DPR. Peran DPR pada demokrasi liberal sangat penting, karena DPR sebagai parlemen menjalankan tugasnya sebagai kontrol dalam pemerintahan. Apabila mayoritas dalam parlementer tidak mendukung kabinet maka kabinet harus mengembalikan mandat kepada presiden, setelah itu presiden membentuk kabinet baru (G Moedjanto, 1988). Hal inilah yang menjadikan pemerintahan pada masa demokrasi liberal sering bergonta-ganti kabinet, karena selama berjalannya demokrasi liberal sering terjadi pergantian koalisi partai yang menyebabkan perubahan suara dalam parlemen.

Koalisi partai pada masa demokrasi liberal sangat berpengaruh, karena sistem politik pada masa ini menganut sistem multipartai sehingga mendorong lahirnya banyak partai (Setiawan, dkk., 2018). Kabinet yang memiliki koalisi yang kuat maka dapat bertahan lama dalam menjalankan pemerintahan. Sementara itu kabinet yang koalisi partainya lemah atau sering terjadi konflik maka akan mudah tergoncang dalam melaksanakan jalannya pemerintahan.

Suksesi Kekuasaan Selama Demokrasi Liberal

Menurut Hoekwoerth suksesi diartikan sebagai perubahan suatu pemerintahan yang meliputi perubahan personal dan kabinet, dari kepala negara yang lama dengan yang baru (Nufiar, 2019). Pergantian kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal merupakan salah satu wujud dari sebuah suksesi kekuasaan dalam pemerintahan. Selama pelaksanaan UUDS 50 yakni tahun 1950-1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pergantian tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Kabinet Natsir

Nama Kabinet Natsir merujuk pada perdana Menteri yang ditunjuk yaitu Mohammad Natsir. Kabinet ini menjadi kabinet pertama yang lahir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang di pimpin oleh Partai Masyumi. Yahya dalam Mukti Diapepin (2020) mengatakan Mohammad Natsir juga mendapat dukungan dari kalangan non partai seperti militer dan tokoh ternama diantaranya Hamengku Buwono IX, Mr Asaat, Mr Muh Roem, Ir Djuanda, dan Soemitro Djojohadikusumo. Dukungan tersebut memperkokoh posisi Mohammad Natsir dalam menjalankan pemerintahan meskipun Partai Nasional Indonesia (PNI) tidak bergabung dalam koalisi dan memilih menjadi oposisi.

Mohammad Natsir menjabat sebagai perdana menteri selama 7 bulan 21 hari, tepatnya pada tanggal 6 September 1950 - 27 April 1951 (Zulkarnain Ridwan, 2021). Waktu yang cukup singkat untuk menjalankan program kerja dalam pemerintahan. Kabinet ini lengser karena mendapat mosi tidak percaya dari DPR. Mosi tersebut lahir karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan target program kerja, maraknya pemberontakan dan penolakan terkait Peraturan Pemerintah (PP) No 39 tahun 1950 tentang DPRD oleh PNI sebagai oposisi. Mosi tersebut diserahkan pada tanggal 22 Januari 1951 oleh S. Hadikusumo (Mukti Diapepin 2020). Koalisi dalam Kabinet Natsir satu per satu juga mulai melepaskan diri seperti Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII). Merasa tidak mendapat dukungan Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden pada 21 Maret 1951 (G. Moedjanto 1988). Berakhirnya pemerintahan kabinet Natsir bukan berarti kabinet ini langsung dibubarkan, kabinet masih harus tetap bekerja menunggu 57 hari hingga kabinet baru terbentuk (Bibit Suprpto, 1985).

2. Kabinet Sukiman

Setelah lengsernya Mohammad Natsir dari jabatan perdana menteri. Proses pemilihan kepala kabinet selanjutnya berjalan cukup panjang. Pada mulanya Presiden Soekarno menunjuk Mr. Sartono dari PNI sebagai formatur untuk membentuk koalisi antara PNI dengan Masyumi (Mukti Diapepin, 2020). Setelah hampir satu bulan usaha yang dilakukan Mr. Sartono gagal dan ia menembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya Presiden menunjuk Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi dan Sidik Djojokusarto dari PNI untuk membentuk tim Koalisi (Ibrahim, 1985). Setelah tim tersebut ditunjuk dan melaksanakan berbagai rapat pembentukan kabinet, akhirnya terbentuklah kabinet yang baru terdiri dari koalisi 2 partai besar PNI dan Masyumi. Sukiman sebagai perdana menteri dan Suwirjo dari PNI sebagai wakilnya, sementara Sidik Djojokusarto tidak masuk dalam kabinet karena ia menjadi formatir dalam pembentukan kabinet (Ibrahim, 1985).

Kabinet Sukiman melaksanakan amanahnya selama 9 bulan 27 hari atau tepatnya 27 April 1951-23 Februari 1952 (Ibrahim, 1985). Mendapat dukungan dari 2 partai besar tidak menjamin koalisi dalam tubuh Kabinet Sukiman baik-baik saja. Konflik internal maupun

eksternal yang terjadi selama kabinet ini menjalankan pemerintahan tidak dapat dielakan. Beberapa pemicu menjadi penyebab mundurnya kabinet diantaranya ketidakharmonisan dengan militer, belum berhasilnya masalah Irian Barat dan mulai munculnya tanda-tanda korupsi dikalangan pejabat (Moedjanto, 1988).

Pukulan paling telak yang menjadikan kabinet ini runtuh ialah condong dengan Amerika Serikat. Ahmad Subardjo sebagai menteri luar negeri menandatangani *Mutual Security Aids* (MSA) atau bantuan keamanan dari Amerika Serikat. Hal itu menjadikan prahara di dalam koalisi. Ahmad Subardjo sebagai menteri luar negeri dianggap merugikan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ahmad Subardjo pun mengundurkan diri pada 11 Februari 1952, selanjutnya Sukiman sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatan menteri luar negerinya juga mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri pada 23 Februari 1952 (Ibrahim, 1985). Setelah pengundurandiri tersebut berakhirilah Kabinet Sukiman pada masa demokrasi liberal.

3. Kabinet Wilopo

Setelah dikembalikannya mandat kabinet Sukiman kepada Presiden Soekarno, maka suksesi kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia kembali berlanjut. Pembentukan kabinet baru tidak berjalan dengan lancar. Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojokusarto dan Prawoto Mangkusaswito untuk membentuk kabinet baru, namun mereka yang ditunjuk sebagai tim formatir gagal melaksanakan tugasnya (Setiawan, dkk., 2018).

Lahirnya kabinet baru terealisasi sekitar 1 bulan lebih 7 hari setelah Sukiman mengundurkan diri. Akhirnya Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo dari PNI untuk menyusun kabinet. Pada 30 Maret 1952, Kabinet Wilopo pun lahir dengan dukungan 3 partai koalisi yakni PNI, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) (G. Moedjanto, 1988). Harapan Besar muncul pada koalisi ini karena kabinet ini diisi oleh anggota yang merupakan golongan-golongan muda.

Kabinet Wilopo menjadi kabinet pertama yang berhasil melewati masa periode lebih dari 1 tahun pada demokrasi liberal di Indonesia. Kabinet ini menjalankan tugasnya selama 1 tahun 2 bulan lebih 2 hari atau sejak 30 Maret 1952 hingga 2 Juni 1953 (G. Moedjanto, 1988). Seperti kabinet-kabinet sebelumnya, Kabinet Wilopo juga mengalami permasalahan-permasalahan baik dari internal koalisi ataupun eksternal koalisi.

Permasalahan yang lahir dari internal koalisi diantaranya ialah retaknya partai koalisi dan mundurnya beberapa menteri. Retaknya internal koalisi terjadi ketika Partai Masyumi mengalami perpecahan yaitu antara Masyumi Natsir dengan Masyumi Sukiman serta keluarnya NU dari Partai Masyumi yang membuat stabilitas koalisi menjadi goyah. (Bibit Suprpto, 1985). Stabilitasnya sebuah koalisi menjadi kekuatan penting dalam pemerintahan pada masa demokrasi liberal ini. Manakala kabinet itu pecah dan tidak lagi menguasai parlemen, maka kabinet tersebut akan jatuh (Suwarno, 2012).

Sementara itu dari eksternal koalisi muncul dari pergolakan yang lahir dari tragedi 17 Oktober 1952 dan masalah Tanjung Marowa. Tragedi 17 Oktober 1952 terjadi karena terlalu ikut campurnya Parlemen didalam urusan internal Angkatan Darat, sehingga memicu tuntutan untuk segera dibubarkannya parlemen oleh Presiden Soekarno (G. Moedjanto, 1988). Demonstrasi dilakukan oleh angkatan darat didepan Istana Presiden menggunakan alat-alat perang yang dimiliki sehingga menimbulkan ketegangan didalam pemerintahan, akhirnya demonstrasi tersebut dapat diredam oleh Presiden Soekarno. Dampak dari peristiwa tersebut

ialah keinginan Soekarno untuk mempercepat adanya Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga komposisi yang ada di parlemen dapat berubah.

Selanjutnya, pukulan yang cukup telak menghantam kabinet Wilopo adalah penyelesaian kasus Tanjung Marowa. Tanjung Marowa adalah sebuah wilayah yang terdapat di Sumatera Timur dimana disana terdapat lahan konflik yang diperbutkan oleh petani lokal dengan pemodal asing yang mendapat jaminan dari pemerintah. Pada tanggal 16 Maret 1953 terjadi pentraktor tanah di tanah sengketa tersebut namun mendapat protes dari petani sehingga timbul kericuhan dan polisi melakukan beberapa tembakan menyebabkan tewasnya beberapa petani (G. Moedjanto, 1988). Peristiwa tersebutlah yang menyebabkan para aktifis geram sehingga memunculkan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Sigit Kertapati seorang aktifis dari Sarekat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet pada tanggal 23 Mei 1953 (Bibit Suprpto, 1985).

Mosi Tidak percaya tersebut diserahkan kepada parlemen. Mosi tersebut menjadi jalan bagi Kabinet Wilopo untuk mengahiri perjalanan dalam pemerintahan. Akhirnya kabinet pun memilih untuk mengembalikan mandat sebelum putusan mosi ditetapkan pada 2 Juni 1953 (G. Moedjanto, 1988). Persiden pun mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 99 tahun 1953, sebagai penanda Demisionernya Kabinet Wilopo pada tanggal 3 Juni 1953 (Bibit Suprpto, 1985). Kabinet Wilopo pun berakhir dan kabinet baru segera dibentuk untuk melanjutkan suksesi kekuasaan di pemerintahan.

4. Kabinet Ali I

Sejak lengsernya Kabinet Wilopo, membuthkan waktu hampir 2 bulan untuk mendapatkan Kabinet Baru. Beberapa kali dibentuk tim formatir namun gagal dalam membentuk kabinet baru. Formatir pertama Rum dari Masyumi dan Mangunsarkoro dari PNI, kedua Mukarto dari PNI, dan ketiga Burhanudin Harahap dari Masyumi semuanya mengalami kegagalan dalam membentuk kabinet baru (Bibit Suprpto, 1985). Akhirnya sosok formatir yang berhasil membentuk kabinet baru ialah Wongsonegoro dari Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), tepatnya pada 31 Juli 1953 ia berhasil membentuk kabinet baru dengan perdana menteri ialah Ali Sastroamijoyo dari PNI (G. Moedjanto, 1988). Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali I dan merupakan kabinet pertama yang didalamnya tidak ada Masyumi namun kabinet ini mendapat dukungan dari Partai Nahdhatul Ulama (NU).

Kabinet Ali merupakan kabinet dengan masa jabatan paling lama sejak berlakunya UUDS 50. Kabinet ini menjabat selama 1 tahun 11 bulan lebih 24 hari atau sejak 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955 (G. Moedjanto, 1988). Kelebihan dari kabinet ini adalah berhasil melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KAA) di Bandung yang diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika.

Keberhasilan kabinet ini pun menjadi prestasi bagi Ali Sastroamijoyo sebagai perdana menteri, namun kabinet ini juga memiliki masa untuk lengser dan digantikan oleh kabinet selanjutnya. Kabinet ini lengser salah satunya karena mundurnya NU dari koalisi yang berkonflik dengan partai PNI (Ketut Sedana Arta, 2020). Lepasnya NU sebagai 1 dari 2 partai besar yang mengusung kabinet ini menjadikan koalisi dalam kabinet tidak lagi stabil.

Tumbangnya kabinet Ali I semakin diujung tanduk dengan adanya peristiwa pemboikotan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru yang dilakukan oleh Angkatan Darat (AD) pada tanggal 27 Juni 1955 (G. Moedjanto 1988,). Peristiwa tersebut

memperkeruh suasana kabinet dan menjadi noda bagi kabinet ini. Apalagi didukung oleh berbagai partai dan media masa. Akhirnya karena peristiwa itu kabinet ini mendapatkan mosi tidak percaya yang diusulkan oleh Zainal Baharudin (G. Moedjanto 1988).

Kabinet semakin terdesak dan kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap pemerintah. Akhirnya Kabinet ini mengembalikan mandat kepada pada tanggal 24 Juli 1955. Mandat diberikan kepada wakil presiden karena presiden saat itu sedang melaksanakan ibadah haji (Mukti Diapepin, 2020). Setelah mandat diberikan kabinet Ali I pun lengser dan sukseki kekuasaan di pemerintahan masih berlanjut di kabinet selanjutnya.

5. Kabinet Burhanudin Harahap

Setelah mundurnya Ali Sastro Amijoyo sebagai perdana menteri, terjadi kekosongan kekuasaan di pemerintahan selama kurang lebih 17 hari. Moh. Hatta yang saat itu menggantikan Presiden Soekarno yang sedang menunaikan ibadah Haji melakukan *hearing* atau dengar pendapat dari para anggota partai. *Hearing* dilaksanakan tanggal 26-28 Juli 1955 hingga akhirnya terbentuklah tim formatur yang akan menentukan kabinet baru, yaitu Sukiman dari Masyumi, Wilopo dari PNI dan Mr. Asaat dari non partai yang diharapkan dapat menjembatani partai-partai yang ada (Achmad Mudjiono, 2017). Hasil rapat tim formatur yang telah dibentuk terpilihlah Burhanudin Harahap dari Masyumi sebagai perdana menteri. Burhanudin Harahap resmi menjalankan tugasnya pada 12 Agustus 1955 (Johan,dkk. 2018).

Menurut Arta dan Margi Kabinet Burhanudin Harahap memiliki tugas utama yakni mengembalikan kewibawaan pemerintah dimata rakyat dan Angkatan Darat, melaksanakan pemilu, melakukan pembatalann hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), menurunkan inflasi, menumpas korupsi dan pengembalian Irian Barat (Ketut Sedana Arta, 2020). Selama berjalannya kabinet ini, program yang mencolok dan terlihat sukses adalah pelaksanaan Pemilu pada tahun 1955. Pemilu ini menjadi Pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilu pada tanggal 29 September 1955 untuk menentukan anggota parlemen atau DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Hasil dari pemilu tersebut ialah PNI menempatkan 57 wakil, Masyumi 57 wakil, NU 45 wakil dan PKI 39 wakil dan sisanya 59 kursi diambil oleh partai-partai kecil dengan wakil 1 - 8 anggota parlemen dengan total semua anggota parlemen 257 kursi (G. Moedjanto, 1988).

Kabinet Burhanudin Harahap menjalankan tugasnya selama 6 bulan 20 hari. Seperti kabinet sebelum-sebelumnya, kabinet ini juga memiliki permasalahan dengan koalisi sehingga menjadikan kinerja kabinet ini menurun. Kabinet ini dianggap selesai ketika pemilu berhasil dilaksanakan. Akhir kabinet ini ialah ketika hasil pemilu diumumkan secara resmi tepatnya 2 Maret 1956, Burhanudin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada tanggal 3 Maret 1956 (Achmad Mudjiono, 2017).

Berakhirnya Kabinet Burhanudin Harahap melahirkan sebuah catatan baru dalam Sejarah pemerintahan di Indonesia. Sebuah catatan yang merubah cara penentuan kabinet di masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbalan parlemen sementara, karena kabinet selanjutnya ditentukan dari hasil Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada kabinet ini (G. Moedjanto, 1988). Berhasilnya pemilu menjadikan tanda bahwa kabinet ini juga berhasil dalam melaksanakan demokrasi parlementer.

6. Kabinet Ali II

Kabinet baru segera dibentuk setelah Buhanudin Harahap mengundurkan diri sebagai perdana Menteri. Soekarno menunjuk Ali Sastroamijoyo menjadi tim formatur dengan koalisi partai PNI, Masyumi, dan NU yang merupakan 3 dari 4 besar pemenang pemilu 1955. PKI sebagai partai nomor 4 tidak masuk dalam kabinet (G. Moedjanto 1988). Setelah menunggu 17 hari, akhirnya kabinet baru terbentuk. Kabinet dengan perdana Menteri Ali Sastroamijoyo ini resmi melaksanakan tugas pada 20 Maret 1956 (Setiawan, dkk., 2018).

Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali II, karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo yang menjabat untuk keduanya. Kabinet Ali II memiliki beban yang cukup berat yakni melanjutkan program yang belum terealisasi pada Kabinet Burhanudin Harahap. Program-program tersebut diantaranya pembatalan KMB, perjuangan Irian Jaya, menegakkan Hankam, dan Melaksanakan hasil dari KAA (G. Moedjanto, 1988).

Pada masa Kabinet Ali II ini terjadi peristiwa besar yang nantinya akan merubah jalan demokrasi Indonesia dan meruba pola suksesi kekuasaan di pemerintahan Indonesia. Pada masa ini lahirlah Konsepsi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Konsepsi Presiden ini merupakan reaksi Presiden Soekarno yang melihat carut-marut politik Indonesia saat berlangsungnya demokrasi liberal. Isi dari Konsepsi Presiden yang lahir pada 21 Februari 1957 adalah pembentukan Kabinet Gotong-royong dan pembentukan Dewan Nasional (G. Moedjanto 1988). Kabinet Gotong-royong adalah kabinet yang berisi semua partai dari DPR dan 4 partai pemenang pemilu 1955, sementara Dewan Nasional adalah dewan perwakilan dari golongan-golongan yang ada di masyarakat.

Peristiwa lain yang tidak kalah menarik adalah berpisahnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Pasangan yang muncul sejak Proklamasi ini akhirnya berpisah dan tidak berjalan beriringan lagi karena perbedaan pemikiran. Wakil Presiden Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember 1956 (G. Moedjanto 1988). Sejak saat itu Soekarno menjadi pemimpin tunggal atau kepala negara di Indonesia.

Sejak 2 peristiwa diatas konflik internal dalam kabinet pun semakin besar. Tuntutan untuk kabinet mengembalikan kekuasaan kepada presiden pun digaungkan oleh Masyarakat di Daerah. Masyumi sebagai salah satu koalisi pun menarik semua menteri dari kabinet. Hal tersebut melemahkan kondisi kabinet yang semakin lama semakin tidak solid. Akhirnya pada 14 Maret 1957 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno (M. C. Ricklefs 2010). Sejak saat itu Kabinet Ali II pun berakhir dan nantinya akan digantikan oleh kabinet baru yang dikenal dengan *zaken* kabinet.

7. Kabinet Djuanda

Tanggal 15 Maret 1957 Soekarno menunjuk Suwiryo sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru yang merupakan *zaken* kabinet yaitu kabinet yang isinya para ahli bukan politisi, namun mengalami kegagalan dalam 2 kali penunjukan hingga akhirnya Soekarno pun mendeklarasikan dirinya sendiri untuk menjadi formatur pembentuk kabinet (Febta Pratama Aman 2013). Soekarno mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan mengajak diskusi untuk membahas bagaimana kabinet selanjutnya akan di bangun. Soekarno juga mengundang Ali Sastroamijoyo dalam sebuah rapat tertutup pembentukan kabinet. Ali mengusulkan nama Ir. Djuanda sebagai perdana menteri karena ia merupakan sosok yang ulet dalam bekerja dan tidak terikat dalam partai (Setyawan, 2017). Pemilihan Djuanda sebagai perdana menteri tidak

terlepas dari konsepsi presiden yang memang tidak menginginkan adanya gesekan antar partai politik. Akhirnya kabinet ini resmi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI No 108 tahun 1957 pada tanggal 9 April 1957 (Bibit Suprpto, 1985).

Kabinet yang juga dikenal dengan Kabinet Karya ini beranggotakan para ahli bukan politisi sehingga menjadikan yang kabinet ini lebih leluasa dalam menjalankan program-programnya, karena minimalnya gesekan antar partai politik yang ada di dalam kabinet. Program kabinet ini selain mensukseskan Konsepsi Presiden yang digagas oleh presiden Soekarno juga menyelesaikan program-program Kabinet Ali II yang belum usai. Program-program Kabinet Djuanda diantaranya ialah membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Jaya dan penggiatan Pembangunan (Setiawan dan Wisnu, 2017).

Permasalahan lain yang muncul pada Kabinet Djuanda ialah tentang hasil dari sidang Konstituante yang tidak menemui titik terang terkait undang-undang yang akan di buat sebagai landasan negara. Buntut kegagalan tersebut, menjadikan adanya keinginan untuk kembali ke UUD 45. Sejak 30 Mei hingga 2 Juni 1959 Dewan Konstituante mengadakan 3 kali *voting* untuk mencapai kesepakatan kembali ke UUD 45 namun dari semua *voting* tidak ada yang memenuhi *quorum* 2/3 peserta *voting*, sehingga hasil keputusan dari semua *voting* pun buntu atau tanpa hasil (Suprpto, 1985).

Voting yang tidak pernah menemui kata sepakat berdampak pada kejenuhan anggota Konstituante untuk hadir di sidang. Hal itu menyebabkan usulan kembali menggunakan UUD 45 pun menguat terutama dari kalangan militer, begitu juga desakan kepada Soekarno untuk kembali menggundangkan UUD 45 dengan dekrit semakin kuat (G. Moedjanto, 1988). Akhirnya tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya ialah pembubaran Konstituante, Kembali berlakunya UUD 45 dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)(G. Moedjanto, 1988). Hadirnya Dekrit Presiden tersebut merubah sistem pemerintahan Indonesia yang sudah dibangun sejak tahun 1950. UUDS 50 sudah tidak berlaku kembali lagi di Indonesia dan konstitusi negara sekarang menggunakan UUD 45. Sehari setelah Dekrit Presiden keluar Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno, tepatnya pada 6 Juli 1959 (Bibit Suprpto, 1985). Setelah dikembalikannya mandat, berakhir sudah masa pemerintahan kabinet Djuanda dan berakhir pula masa Demokrasi Liberal di Indonesia.

Akhir masa Demokrasi Liberal

Tanda-tanda berakhirnya Demokrasi Liberal sebenarnya sudah ada sejak munculnya Konsepsi Presiden tahun 1957. Presiden Soekarno selaku Kepala Negara juga sering mengungkapkan bahwa negara kita memiliki sebuah demokrasi "Asli" yakni demokrasi dengan kepemimpinan atau Demokrasi Terpimpin (Haris, 1994). Pernyataan tersebut tentu saja berlawanan dengan pemahaman konsep Demokrasi Liberal, dimana dalam Demokrasi Liberal konsep kebebasan dan menjunjung tinggi hak-hak individu maupun kelompok dijunjung tinggi.

Selanjutnya ialah pembentukan *zaken* Kabinet, dimana peran partai dalam kabinet mulai mengecil. Buktinya adalah Penunjukan Djuanda sebagai perdana menteri yang tidak ikut dalam Pemilu 1955 karena tidak masuk sebagai anggota partai (Suprpto, 1985). Hal tersebut menunjukan bahwa hak-hak partai terutama hasil pemilu 1955 telah diabaikan, sementara pada Demokrasi Liberal partai merupakan unsur penting dalam penyusunan kabinet. Peran

koalisi dan oposisi akan saling mengsi ketika unsur partai ada sehingga terjadi keseimbangan didalam pemerintahan.

Kegagalan Konstituante hasil pemilu 1955 dalam membentuk UU baru menjadi puncak tanda-tanda berakhirnya Demokrasi Liberal. Konstituante yang diharapkan mampu menghasilkan UU baru mengalami *deadlock* karena konflik kepentingan golongan didalamnya (Suwarno, 2012). Desakan kembali menggunakan UUD 45 pun dibarengi dengan penerapan gagasan Konsepsi Presiden yang lahir di tahun 1957. Akhirnya lahirlah Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya Kembali UUD 45 sehingga dengan demikian masa demokrasi berdasarkan parlementer berakhir dan berganti menjadi Demokrasi Terpimpin (Budiardjo, 2013).

KESIMPULAN

Demokrasi Liberal di Indonesia lahir sejak di berlakukannya UUDS 50. UUDS 50 mengatur seluruh pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Secara umum pada masa Demokrasi Liberal pemerintahan Indonesia dipegang oleh perdana menteri sementara presiden menjadi simbol kepala negara. Perdana menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga meskipun presiden hanya sebagai symbol kepala negara namun presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan menurunkan kepala pemerintahan.

Selama berjalannya Demokrasi Liberal di Indonesia telah terjadi 7 kali suksesi kekuasaan di pemerintahan Indonesia. Sistem multipartai yang berlaku pada Demokrasi Liberal memungkinkan untuk terjadinya pergantian kabinet sesuai dengan keinginan parlemen. Sehingga antara partai satu dengan yang lainnya dapat saling menjatuhkan apabila tidak ada kesepakatan dalam melaksanakan jalannya pemerintahan. Selama 7 pergantian kabinet ada 6 perdana menteri yang pernah menjabat diantaranya Moh Natsir, Sukiman Wiryosanjoyo, Mr. Wilopo, Ali Sastroamajoyo, Burhanudin Harahap dan Mr Djuanda Kartawijaya. Ali Sastroamajoyo menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat sebanyak 2 kali sebagai perdana menteri.

Jatuh banggunya kabinet selama Demokrasi Liberal menjadi petaka dalam negara menjalankan program-program pemerintahannya. Sehingga itu menjadi kegagalan dalam pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia. Kegagalan tersebut memunculkan sebuah gagasan yang dimiliki oleh Presiden Soekarno yang di kenal dengan Konsepsi Presiden yang lahir pada 21 Februari 1957. Konsepsi Presiden inilah yang membuka jalan bubarinya Demokrasi Liberal di Indonesia. Puncaknya ialah dengan Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengubah secara total sistem pemerintahan Indonesia yang kembali menggunakan UUD 45 sebagai konstitusi negara. Setelah kembalinya UUD 45 sebagai konstitusi negara maka tidak berlaku lagi UUDS 1950, dengan begitu tidak berlaku juga sistem pemerintahan parlementer di Indonesia dan berubahlah Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, F. P. (2013). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957-1959. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1).
- Arta, K.S. (2020). "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 di Indonesia." *Widya Citra Vol I No 2* 69-85.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Diapepin, Mukti. (2020). "Memulihkan Komunikasi Belajar dari Jatuh Bangunnya Kabinet Pada Masa Demokrasi Parlementer." *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 1 Tahun 2020* 34-46.
- Haris, S. (1994). *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: LP3ES.
- Ibrahim. (1985). *Dr. Soekiman Wirdjosandjojo: Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- MahfudMD, Moh. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad ke-20 2: Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mudjiono, Achmad. (2017). "Kabinet Burhanudin Harahap 1955-1956." *Avatara Volume 5 No 3 Oktober 2017* 686-700.
- Noviati, Corra Elly. (2013). "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 2 Juni 2013* 333-354.
- Nufiar. (2019). *Sukses Kepemimpinan pada Masa Kesultanan Aceh: Analisis terhadap Peran Ulama dalam Politik Tahun 1604-1699 M*. Banda Aceh: PT Bambu Kuning Utama.
- Priyadi, S. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M.C. (2010). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Ridwan. (2021). *Sejarah Hukum Tatanegara Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Rusfiana, Y. & Nurdin, I. (2017). *Dinamika Politik Kontemporer: Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 365-378.
- Setyawan, A. B. (2017). DJUANDA KARTAWIDJAYA: DARI MENTERI HINGGA PERDANA MENTERI 1946-1959. *Avatara*, 5(2).
- Suprpto, B. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Suwarno, P.J. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, & Sosio-Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwarno. (2012). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: 2012.